

Collaborative Governance Dalam Pengembangan Nawa Fun And Education di Desa Tambaknegara, Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas

Rizal Wahyu¹, Chamid Sutikno², Ariesta Amanda³
¹²³ **Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto**

*Korespondensi : rizalwahyu0708@gmail.com, c.sutikno@unupurwokerto.ac.id

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the collaborative governance process in the development of Nawa Fun and Education in Tambaknegara Village, Rawalo District, Banyumas Regency. The development of Nawa Fun and Education involves numerous stakeholders, not only from the government but also non-governmental actors, including the community and the private sector. This is a characteristic of collaborative governance, necessitating a study to examine the collaborative process among these stakeholders. The research method used was qualitative with a descriptive approach and purposive sampling as the informant selection technique. This study employed the collaborative governance model developed by Russell Matthew Linden (2002). The study concluded that the collaborative governance process demonstrated a good level of cohesion, particularly based on four aspects: foundational collaboration, commitment, support, and collaborative leadership. However, there were still shortcomings in the relationship aspect, particularly in the lack of stakeholder trust in the development of Nawa Fun and Education.

Keywords: Collaborative Governance, Nawa Fun and Education Development, Tambaknegara Village.

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

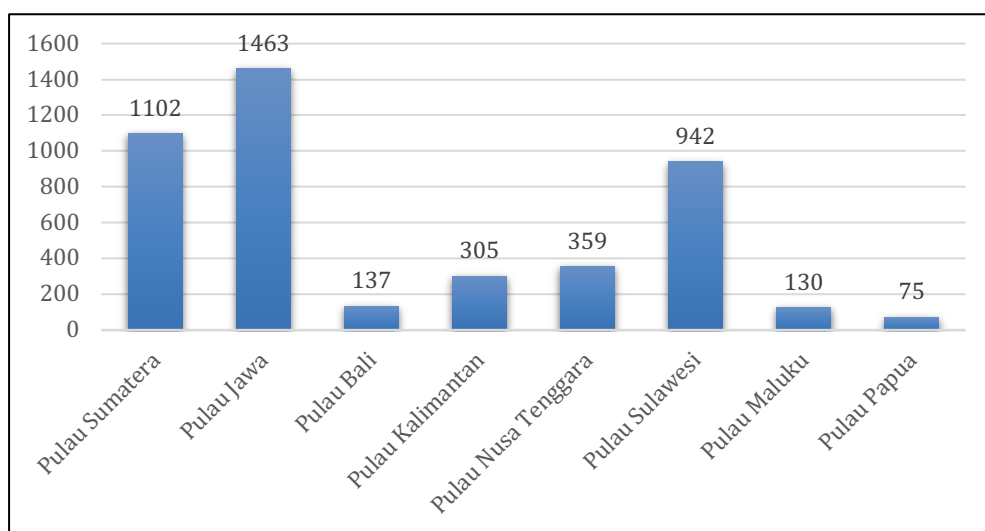
Pembangunan pariwisata adalah sebuah kerangka atau model yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelidiki dan mengembangkan industri pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara. Nilai kearifan lokal suatu destinasi menjadi salah satu daya tariknya sehingga lebih menarik bagi wisatawan. Tanpa harus mengurangi atau menambah nilai budaya yang sudah ada, kearifan atau budaya lokal seharusnya memiliki nilai lebih (Akbar, M. T., & Sihalohe, 2019). Pariwisata harus mendapat perhatian lebih karena merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Industri pariwisata di Indonesia berkembang sangat pesat ditandai dengan meningkatnya jumlah tempat wisata. Setiap daerah berupaya mengembangkan model wisata khas yang dimaksudkan untuk menarik wisatawan. Potensi ini dapat mendorong perekonomian masyarakat, karena industri pariwisata menawarkan peluang pasar yang menjanjikan (Maddatuang et al., 2020). Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan harus direncanakan secara holistik, dengan menitikberatkan pada aspek ekonomi dan budaya masyarakat setempat (Alfada, 2019). Pemangku kepentingan dari sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat setempat semuanya berperan dalam pembangunan pariwisata, bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati. Kemampuan pemangku kepentingan untuk secara efektif mengelola potensi daerah, mengintegrasikan peran dan tanggung jawab mereka untuk mengelola sumber daya secara efektif dianggap sebagai pembangunan yang optimal. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung seperti modal dan teknologi informasi adalah contoh dari sumber daya tersebut (Kirana & Artisa, 2020).

Kebijakan pembangunan pariwisata pedesaan yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan industri berbasis potensi ekonomi pedesaan setempat, dengan itu maka akan menstimulus pembangunan daerah yang mayoritas penduduknya bertumpu pada sektor pertanian. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah mencapai keserasian, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi di pedesaan akan sandang dan pangan untuk konsumsi berbasis nilai produksi dan potensi sektoral. Pembangunan ekonomi regional, perkotaan, dan pedesaan di berbagai wilayah (Karim et al., 2021). Sesuai dengan dinamikanya, gerakan menuju pengembangan pariwisata menggunakan istilah-istilah seperti pembangunan pariwisata berkelanjutan, desa wisata, dan ekowisata. Ekowisata adalah metode pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk memastikan bahwa pariwisata dapat dilakukan di tempat lain selain kota. Kedudukan desa wisata pada pembangunan pedesaan berkelanjutan dalam industri pariwisata merupakan salah satu alternatif strategi pengembangan pariwisata (Ekowati, 2020).

Pengembangan desa wisata dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan daya tarik pariwisata Indonesia karena keunikan dan keragaman masing-masing desa (Atmoko, 2014). Pembangunan semacam ini dapat merangsang pembangunan pedesaan berkelanjutan, menerapkan praktik pengelolaan yang menguntungkan, dan melibatkan masyarakat setempat (Sastrayuda, 2017). Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menjadikan desa wisata sebagai sarana integrasi pembangunan desa untuk mewujudkan transformasi sosial, budaya, dan ekonomi dalam rangka mendorong kemandirian desa.

Pembangunan pariwisata menghadapi berbagai keterbatasan dan hambatan salah satunya yaitu keterbatasan perhatian, anggaran dan sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah dalam menggarap potensi wisata di daerah. Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakmampuan pemerintah ketika menangani masalah publik yang semakin kompleks adalah dengan menerapkan model tata kelola kolaboratif atau biasa disebut dengan *collaborative governance* (Charalabidis, Yannis & Koussouris, 2012). *Collaborative governance* muncul dari proses transisi konsep *government* ke *governance* yaitu menempatkan penekanan lebih besar pada administrasi publik daripada institusi pemerintahan. Dalam hal ini adalah pemangku kepentingan dan masyarakat, konsep *governance* lebih menekankan keterlibatan mereka (Sari, 2014). Gagasan *governance* tampaknya mengurangi dominasi negara yang berlebihan. Hal itu berdampak pada studi administrasi publik yang kemudian bergeser ke penelitian kolaboratif (Silvia, 2011). *Collaborative governance* adalah proses struktur jaringan multi-organisasi lintas sektoral (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil) yang menciptakan dan mengembangkan norma dalam interaksi timbal balik, mencapai konsensus melalui interaksi formal dan informal, dan membuat kesepakatan bersama, saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Alhasil, semua aktor tampak berada pada posisi yang sama dalam interaksi kolaboratif yang egaliter. Pada proses pengembangan desa wisata memerlukan pelibatan dan sinergitas antar stakeholder dari berbagai sektor baik *government*, *private sector* dan *civil society* (Kirana & Artisa, 2020). Kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata bisa berupa pengoptimalan potensi desa menjadi objek wisata, pembuatan event atau pameran wisata, pemasaran produk desa wisata dan lain sebagainya.

Berdasarkan data Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia per-September 2023, jumlah desa wisata di Indonesia telah mencapai 4.733 desa dengan persebaran terbanyak berada di Pulau Jawa yaitu sebanyak 1.463 desa, kedua di Pulau Sumatera dengan 1.322 desa wisata, selanjutnya Pulau Sulawesi sebanyak 942 desa, lalu berturut-turut yaitu Pulau Nusa Tenggara sebanyak 359 desa, Pulau Kalimantan sebanyak 305 desa, Pulau Maluku sebanyak 130 desa dan yang paling sedikit adalah Pulau Papua dengan 75 desa wisata.



Gambar 1. Jumlah Desa Wisata Berdasarkan Pulau-Pulau Besar Di Indonesia Per September 2023.

Sumber : Jaringan Desa Wisata Kemenparekraf (diolah).

Namun demikian, dari jumlah 4.733 desa wisata di Indonesia, sebanyak 3.483 desa masih masuk kategori desa rintisan, sebanyak 937 desa berstatus desa berkembang, 290 desa masuk kategori maju dan hanya 23 desa yang sudah berstatus desa mandiri.

Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang sangat mendorong pengembangan desa wisata berbasis potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal desa. Hal itu diejawantahkan dalam program Hasta Krida yang merupakan penjabaran dari visi Bupati Banyumas terpilih pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dimana potensi wisata desa dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa melalui pengembangan desa wisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2022 terdapat sebanyak 21 desa wisata di Kabupaten Banyumas.

Tabel 1. Daftar Desa Wisata di Kabupaten Banyumas.

No	Nama Desa	Kecamatan
1	Perahunan	Pekuncen
2	Melung	Kedungbanteng
3	Karangkemiri	Karanglewas
4	Karangsalam	Baturraden
5	Gerduren	Purwojati
6	Cikakak	Wangon
7	Kalisalak	Kebasen
8	Cirahab	Lumbir
9	Kemutug	Baturraden
10	Karangtengah	Cilongok
11	Darmakradenan	Ajibarang
12	Samudra	Gumelar
13	Karanggintung	Kemranjen
14	Banjarpanepen	Sumpiuh

No	Nama Desa	Kecamatan
15	Kalibagor	Kalibagor
16	Pekunden	Banyumas
17	Kejawar	Banyumas
18	Tamansari	Karanglewas
19	Glempang	Pekuncen
20	Pekuncen	Pekuncen
21	Tambaknegara	Rawalo

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

Dari sejumlah 21 desa wisata di Kabupaten Banyumas, Desa Tambaknegara merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata paling lengkap berdasarkan jenis dan jumlahnya, yaitu terdiri dari potensi alam berupa Hutan Tambaknegara, Pemandian Tirta Husada Kalibacin, Sungai Serayu, Dermaga Sungai Serayu, Bendung Gerak Serayu, dan Camping Ground. Potensi cagar budaya dan situs bersejarah antara lain Bale Malang, Artefak Peninggalan Zaman Purba, Batu Kepalan Bima, Sumur Randa Balik, Sumur Wali Dan Gua Kodoi Jepang. Selanjutnya yaitu Potensi budaya berupa Tradisi Masyarakat Kejawan Kalitanjung dan kesenian masyarakat seperti Gandalia, Seni Tari dan Ebeg.

Tabel 2. Daftar Potensi Wisata yang ada di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo

No	Potensi Cagar Budaya dan Situs Bersejarah	Potensi Alam	Potensi Budaya
1	Bale Malang	Hutan Tambaknegara	Tradisi Masyarakat Kejawan Kali Tanjung
2	Artefak Peninggalan Zaman Purba	Pemandian Tirta Husada Kalibacin	Kesenian (Gandalia, Seni Tari, Ebeg)
3	Batu Kepalan Bima	Sungai Serayu	
4	Sumur Randa Balik	Dermaga Serayu	
5	Sumur Wali	Bendung Gerak Serayu	
6	Gua Kodoi Jepang	<i>Camping Ground</i>	

Sumber : Pra Survei, 1 September 2023.

Desa Tambaknegara menjadi salah satu desa yang berupaya mengembangkan sektor pariwisata dengan basis potensi desa, salah satunya yaitu mengoptimalkan potensi Hutan Tambaknegara untuk dikelola menjadi daya tarik wisata baru yaitu Newa Fun and Education. Dalam pengembangan objek wisata Newa Fun and Education, pemerintah desa bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang berasal dari sektor swasta dan masyarakat. Stakeholder pemerintah terdiri dari Pemerintah Desa dan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur. Dari sektor swasta yaitu CV. Ardelia Jaya. Selanjutnya pada sektor masyarakat terdiri dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tanjung Wanakarya dan Koperasi Masyarakat Perhutanan Sosial (KMPS) Margo Mulyo.

Tabel 3. Daftar Stakeholder Dalam Pengembangan Newa Fun and Education Di Desa Tambaknegara.

No	Masyarakat	Swasta	Pemerintah
1	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tanjung Wanakarya	CV. Ardelia Jaya	Pemerintah Desa

2 Koperasi Masyarakat Perhutanan Sosial (KMPS) Margo Mulyo	Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur
--	---

Sumber : Pra Survei, 1 September 2023

Pengembangan Newa Fun and Education yang ada di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo melibatkan banyak stakeholder yang berasal bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga melibatkan aktor non pemerintah yaitu masyarakat dan swasta, hal tersebut merupakan ciri dari proses collaborative governance sehingga memerlukan kajian untuk meneliti proses kolaborasi diantara stakeholder tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan model collaborative governance dari Russel Matthew Linden (2002) yang memiliki 5 aspek mengenai keberhasilan suatu kolaborasi yaitu dasar kolaborasi, relasi atau hubungan, komitmen, dukungan dan kepemimpinan kolaboratif. Sasaran dalam penelitian ini adalah pihak-pihak atau para stakeholder yang terlibat dalam pengembangan Newa Fun and Education di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari aktor pemerintah (Pemerintah Desa Tambaknegara dan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur), aktor swasta (CV. Ardelia Jaya), aktor masyarakat (Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tanjung Wanakarya dan Koperasi Masyarakat Perhutanan Sosial (KMPS) Margo Mulyo), dan masyarakat desa. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan model analisis data dari John W. Creswell (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Linden (2002), kolaborasi adalah rangkaian proses yang dihubungkan oleh aspek fundamental kolaborasi untuk melihat awal terbentuknya kolaborasi, pemahaman bersama atas situasi masalah, dan upaya merumuskan solusi dari masalah tersebut. Selain tahapan tersebut, hubungan terbuka antar pemangku kepentingan menghasilkan komitmen sekaligus dukungan terhadap tujuan kolaborasi dari pemangku kepentingan. Tentunya peran kepemimpinan kolaboratif tidak lepas dari tahapan-tahapan tersebut. Proses collaborative governance dalam pengembangan Newa Fun and Education di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas dengan menggunakan model collaborative governance Linden (2002) sebagai berikut :

Dasar Kolaborasi

Dasar kolaborasi adalah proses yang menunjukkan alasan bahwa para pemangku kepentingan untuk dapat saling membentuk dan membutuhkan sehingga mendorong mereka untuk melakukan kolaborasi yaitu dengan melihat karakteristik yang sudah ada seperti anggota mengetahui tujuan masing-masing dalam kerjasama, kerjasama digunakan sebagai upaya mencari solusi, keterlibatan orang dalam kerjasama harus tepat agar tujuan dapat tercapai, kerjasama yang dilakukan harus terbuka dalam proses dan pelaksanaannya, serta dibutuhkan seseorang yang dijadikan panutan yang mampu menjadi penarik dalam kerjasama (Linden, 2002).

Pada kolaborasi pengembangan Newa Fun and Education, setiap stakeholder mempunyai tujuan masing-masing dimana tujuan tersebut merujuk pada pembangunan dan pengembangan suatu objek wisata untuk mengoptimalkan potensi Hutan Tambaknegara menjadi wisata alam yaitu melalui pengembangan Newa Fun and Education yang berada di teritorial wilayah Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Linden (2002), yang menyatakan bahwa penting bagi anggota kolaborasi untuk memiliki pemahaman bersama terhadap tujuan kolaborasi. Kesadaran akan tujuan bersama atau sasaran khusus menjadi kunci untuk menghindari pertemuan yang tidak produktif dan memastikan bahwa setiap pihak berkontribusi dengan maksimal. Kekuatan kepentingan bersama akan semakin kuat jika tujuan tersebut dirumuskan secara konkret dan dapat diukur. Hal ini mencakup pertemuan dengan masing-masing pihak untuk mendiskusikan pandangan mereka tentang tujuan kolaborasi, yang pada gilirannya akan memfasilitasi komunikasi yang lebih terbuka dan efektif di antara anggota kolaborasi.

Pada kolaborasi pengembangan Newa Fun and Education, keterlibatan aktor tercermin dalam peran yang jelas dari setiap stakeholder. Setiap aktor yang terlibat dalam kolaborasi merupakan representasi dari organisasinya masing-masing yang merupakan stakeholder dari kolaborasi pengembangan Newa Fun and Education dan diikat melalui suatu kesepakatan berbentuk Memorandum of Understanding atau MoU. Setiap stakeholder mempunyai peran dalam kolaborasi dimana Perhutani berperan sebagai pemilik kewenangan pengelolaan hutan atau penyedia lahan, LMDH berperan sebagai penjemputan pengelolaan hutan, KMPS berperan sebagai wadah yang berbadan hukum yang merupakan representasi masyarakat, CV. Ardelia Jaya sebagai pengembang, investor dan payung hukum untuk membentuk manajemen pengelolaan Newa dan Pemerintah desa sebagai pemangku wilayah yang memberikan dukungan moral dalam pengembangan Newa Fun and Education.

Aktor yang terlibat dalam pengembangan Newa Fun and Education adalah orang yang dapat mewakili organisasi pemangku kepentingan utama dan kelompok kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Newa Fun and Education dan dapat membuat kesepakatan serta mempengaruhi orang lain dalam internal organisasi masing-masing untuk ikut serta dalam kolaborasi pengembangan Newa Fun and Education. Setiap aktor yang terlibat mempunyai dan melaksanakan peran masing-masing sehingga dapat menciptakan kerja kolektif untuk mencapai tujuan kolaborasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ajis Setiawan dan Chamid Sutikno (2022), dijelaskan bahwa peranan stakeholder dalam pengembangan desa wisata sangat diperlukan dan perlu kejelasan tanggung jawab masing-masing stakeholder. Pada pengembangan Desa Wisata Waduk Penjalin Di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes masing-masing pihak yang terlibat memiliki peran, mulai dari pemerintah sebagai penanggung jawab dan pemberi modal anggaran yang berasal dari APBDDes, masyarakat yang mendukung pelaksanaan wisata, sektor swasta yang melakukan investasi dan kelompok sadar wisata sebagai pengelola wisata sehingga mampu menciptakan kegiatan yang memberikan manfaat serta berdampak positif bagi masyarakat.

Pada kolaborasi pengembangan Newa Fun and Education, keterbukaan pada proses dan pelaksanaan kolaborasi ditunjukkan melalui pengambilan keputusan yang diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan semua stakeholder yang melakukan kolaborasi, walaupun pada prosesnya terdapat stakeholder yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan tersebut, termasuk apabila terdapat pihak lain yang akan ikut bergabung dalam kolaborasi maka harus menaati ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam kolaborasi tersebut.

Keterbukaan proses dalam kolaborasi mencakup transparansi dan kejelasan mengenai langkah-langkah yang terlibat dalam kerjasama. Ini melibatkan berbagi informasi, ide, dan perkembangan dengan semua pihak terlibat, membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik, meminimalkan kesalahpahaman, dan membangun kepercayaan di antara anggota kolaborasi. Sementara itu, pelaksanaan kolaborasi terfokus pada eksekusi rencana kerjasama yang telah disepakati.

Ini melibatkan tindakan nyata untuk mencapai tujuan bersama, memerlukan koordinasi yang baik antara anggota kolaborasi, dan kesiapan untuk berkontribusi guna mencapai hasil yang diinginkan. Dengan mengintegrasikan keterbukaan proses dan pelaksanaan kolaborasi, sebuah kerangka kerja yang transparan dan efektif dapat terbentuk, memastikan kesuksesan dalam mencapai tujuan bersama

Pada kolaborasi pengembangan Nawa Fun and Education, setiap stakeholder memiliki role model-nya masing-masing seperti Bapak AM sebagai role model bagi KMPS dan LMDH, Bapak M dari CV. Ardelia Jaya dan Bapak BR dari Perhutani. Bapak BR memiliki pengaruh yang besar terhadap perizinan pengembangan Nawa sedangkan Bapak AM dan Bapak M memiliki pengaruh yang besar dalam proses pelaksanaan teknis pengembangan Nawa Fun and Education.

Keberadaan role model dalam kolaborasi adalah keberadaan aktor yang memperjuangkan inisiatif, seseorang yang mempunyai kredibilitas dan pengaruh yang menjadikan kolaborasi yang dilakukan sebagai prioritas utama. Keberadaan role model dalam kolaborasi bukan hanya dapat memotivasi dan membentuk fondasi kolaborasi yang kuat untuk pencapaian hasil yang maksimal. role model dalam pengembangan Nawa Fun and Education sebagaimana yang sudah tertulis dalam hasil penelitian merupakan aktor yang dianggap pantas dan mampu oleh para anggotanya untuk menjadi pimpinan dalam menjalankan kolaborasi yang mereka lakukan.

Relasi Atau Hubungan

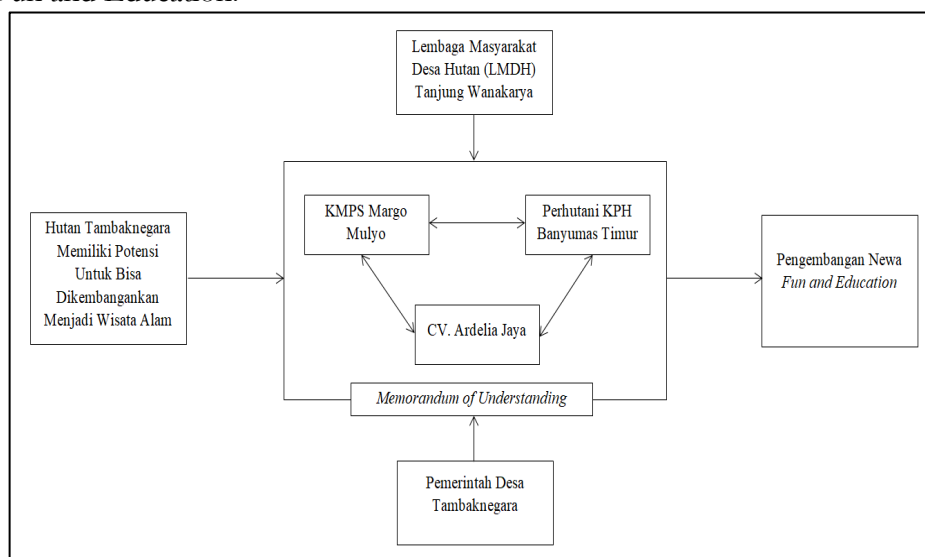
Menurut Linden (2002), salah satu aspek terpenting dari kolaborasi yang sukses adalah dimana dapat membangun kepercayaan di antara para stakeholder sehingga kerjasama dapat terus terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan kolaborasi. Mewujudkan kolaborasi tanpa didasari hubungan yang baik dengan pihak lain tidak akan pernah terlaksana. Tanpa hubungan yang kuat tidak ada kepercayaan dan tanpa ada kepercayaan kolaborasi itu tidak pernah terlaksana. Ketika suatu kepercayaan telah dibangun, stakeholder akan bersedia memberikan manfaat dari keraguan-keraguan yang ada dan mengambil resiko kecil satu sama lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pengembangan Nawa Fun and Education di Desa Tambaknegara menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antar stakeholder masih kurang seperti Perhutani yang masih ragu dengan kemampuan manajemen Nawa untuk dapat mengelola Nawa sampai menjadi objek wisata karena progresnya yang lamban, CV. Ardelia Jaya yang terkait pekerjaan pengembangan Nawa harus selalu diawasi secara sangat intens dan KMPS yang berusaha untuk berpositif thinking. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya tingkat kepercayaan para stakeholder dalam pengembangan Nawa Fun and Education. Hal ini berkaitan dengan permasalahan terkait pengelolaan keuangan yang terjadi sehingga menyebabkan perselisihan antar stakeholder yang berpengaruh pada berkurangnya tingkat kekohesifan kolaborasi dalam pengembangan Nawa Fun and Education yang berdampak pada lambannya progres pembangunan fisik objek wisata Nawa Fun and Education. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Itah Masitah pada tahun 2019 bahwa faktor anggaran dapat menjadi kendala dalam jalannya kolaborasi, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa salah satu kendala yang sering dihadapi dalam proses pengembangan desa wisata adalah minimnya anggaran dan dukungan fasilitas desa wisata masih kurang memadai sehingga perlu untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan desa wisata.

Hubungan yang baik diperoleh dari komunikasi dan koordinasi yang baik pula, proses koordinasi dan komunikasi antar stakeholder dalam pengembangan Nawa Fun and Education sudah berjalan cukup baik, komunikasi dan koordinasi dilakukan melalui media luring dan daring yaitu melalui media sosial whatsapp group dan melalui pertemuan rutin yang dilakukan secara insidental. Upaya koordinasi dan komunikasi dalam kolaborasi bertujuan untuk mengisi kesenjangan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada proses kolaborasi pengembangan Nawa Fun and Education komunikasi dan koordinasi yang dilakukan melalui media luring dan daring bertujuan agar tidak terjadinya miskomunikasi yang akan berdampak pada mispersepsi atau

kesalahpahaman dari stakeholder lain yang dapat membuat ketidakstabilan dan harmonitas kolaborasi yang sedang terbangun. Komunikasi yang intens dan mendalam dalam memberikan dampak yang positif untuk menunjang keberhasilan kolaborasi dan komunikasi yang buruk dapat mengganggu proses kolaborasi dan keberlanjutan kolaborasi. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pilving T., Kull T.b , Suškevičs M.b dan Viira A.H. (2019), dijelaskan bahwa dalam kemitraan pariwisata pedesaan di Estonia, faktor komunikasi yang menurun dan pendanaan yang tidak pasti telah memicu perlambatan kemitraan dan karena itu juga berpengaruh pada keberlanjutan kemitraan.

Relasi atau hubungan yang terbangun karena adanya inisiasi pemanfaatan potensi wisata alam Hutan Tambaknegara untuk bisa dijadikan suatu objek wisata di Hutan Tambaknegara yaitu dengan melakukan pengembangan Newa Fun and Education. Terdapat kolaborasi antar stakeholder dimana keterlibatan para aktor tercermin dalam peran yang jelas dari setiap stakeholder yang terikat oleh Memorandum of Understanding. Perhutani berperan sebagai pemilik kewenangan pengelolaan hutan atau penyedia lahan, LMDH berperan sebagai penjemabatan pengelolaan hutan, KMPS berperan sebagai wadah yang berbadan hukum yang merupakan representasi masyarakat, CV. Ardelia sebagai pengembang, investor dan payung hukum untuk membentuk manajemen pengelolaan Newa dan pemerintah desa sebagai pemangku wilayah yang memberikan dukungan moral dalam pengembangan Newa Fun and Education.



Gambar 2. Relasi dan Peran Stakeholder dalam Pengembangan Newa Fun and Education

Sumber : Olah Data Penulis

Komitmen

Salah satu aspek krusial dari proses kolaboratif adalah komitmen. Menurut Linden (2002), ada 4 (empat) langkah untuk mencapai komitmen, yang meliputi: Orang yang bekerja bersama harus dapat melihat hubungan antara apa yang mereka lakukan dan mencapai tujuan serta memiliki dampak yang lebih besar pada orang lain. Mereka juga harus dapat membuat prioritas melalui tujuan kerja untuk memotivasi diri sendiri menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan, membuat ukuran kinerja yang jelas, dan merumuskan tujuan yang lebih besar. Komitmen adalah elemen kunci yang mendukung keberhasilan kolaborasi. Tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, kolaborasi mungkin kurang efektif dan sulit untuk mencapai tujuan bersama.

Pada proses pengembangan Newa Fun and Education, aspek komitmen sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan kejelasan peran bagi masing-masing stakeholder sehingga memastikan keterlibatan yang terfokus dalam tercapainya tujuan bersama. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa perhutani digolongkan menjadi stakeholder kunci dengan alasan merupakan bagian dari perwakilan pemerintah untuk memberikan penilaian mengenai kelayakan perizinan pengembangan wisata alam yang memanfaatkan hutan, CV. Ardelia Jaya dan KMPS digolongkan menjadi stakeholder utama karena sebagai pelaksana pengembangan Nawa, berhasil atau tidaknya tergantung dari kinerja dari KMPS dan CV. Ardelia Jaya, LMDH juga digolongkan menjadi stakeholder utama karena LMDH sebagai penjemputan kepentingan masyarakat apabila kolaborasi pengembangan Nawa gagal maka akan berdampak langsung kepada tujuan LMDH serta Pemerintah Desa Tambaknegara digolongkan menjadi stakeholder pendukung karena hanya sebagai pihak yang berketempatan secara kewilayahan.

Menentukan jenis hubungan antar stakeholder dalam kolaborasi sangat penting karena memiliki implikasi besar terhadap dinamika, efektivitas, dan kesuksesan keseluruhan dari kerjasama tersebut. Dengan menentukan jenis hubungan antar stakeholder, kita dapat merancang pendekatan yang lebih terarah, efisien, dan efektif dalam mengelola kolaborasi dan mencapai tujuan bersama. Pembagian jenis stakeholder dalam pengembangan Nawa ini berkaitan dengan tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap stakeholder dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan koleboarasi.

Pada proses pengembangan Nawa Fun and Education, rencana prioritas kerja yang terfokus pada pembangunan fisik dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah mencerminkan kesungguhan untuk menjalankan proyek sesuai dengan Masterplan. Menurut Paramitha et al. (2020), konsep pengembangan pariwisata adalah upaya untuk memikat wisatawan dengan menyediakan segala sarana dan prasarana yang diperlukan baik berupa barang dan jasa, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut selaras dengan rencana prioritas pengembangan Nawa adalah mengenai pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana pengembangan wisata yang mengacu pada masterplan pengembangan Nawa. Masterplan mutlak dari dan disusun oleh pengembang yaitu CV. Ardelia Jaya tetapi setiap akan melakukan pembangunan suatu wahana wisata baru maka diadakan pertemuan atau musyawarah untuk membahas teknis pelaksanaan.

Menentukan rencana prioritas kerja dalam kolaborasi merupakan langkah penting untuk mengelola sumber daya, waktu, dan energi secara efektif. Dengan menentukan rencana prioritas kerja, tim kolaborasi dapat mengoptimalkan peluang sukses dan mengatasi tantangan dengan lebih efektif selama perjalanan kolaboratif mereka. pada pengembangan Nawa Fun and Education prioritas pembangunan fisik yang dilakukan bertujuan untuk menyediakan wahana-wahana wisata yang menarik bagi pengunjung, pembangunan fisik yang memadai juga menjadi prasyarat agar dapat segera melakukan launching atau membuka wisata untuk para pengunjung atau wisatawan.

Pada proses pengembangan Nawa Fun and Education, terdapat standar kinerja yang diatur dalam MoU yaitu pemberian wewenang dari Perhutani ke pengembang yaitu CV. Ardelia Jaya dan KMPS untuk melaksanakan pengembangan objek wisata dengan memanfaatkan potensi hutan menjadi wisata alam. Pada MoU standar kinerja tidak tercantum secara spesifik setiap stakeholder tetapi akan dicantumkan apabila sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Menentukan standar kinerja yang jelas perlu dilakukan agar proses berjalannya kolaborasi dapat menjadi lebih terstruktur, terukur, menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas serta dapat dikelola dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Pada pengembangan Nawa Fun and Education, MoU yang dilakukan memberikan kepastian standar kinerja yang harus dipenuhi dalam pembangunan awal Nawa, selanjutnya apabila wahana dan sarana prasarana sudah siap dan objek wisata sudah dibuka maka tentunya akan memberikan konteks yang berbeda dalam menjalankan kerja-kerja kolaborasi sehingga memerlukan standar kinerja baru yang diperbaharui melalui perundingan dan penetapan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pada proses pengembangan Newa Fun and Education, tujuan besar kolaborasi yang mencakup pemanfaatan potensi wisata alam Hutam Tambaknegara sehingga memberikan manfaat sosial dan ekonomi serta manfaat edukasi tentang pelestarian hutan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juang Abdi pada tahun 2021, dijelaskan bahwa potensi wisata di Desa Sanankerto yang sangat besar memiliki potensi untuk bisa digarap agar meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat, hasil pengelolaan potensi wisata yang sudah dilakukan telah meningkatkan kunjungan wisata ke desa wisata Sanankerto dan perekonomian lokal menjadi meningkat. Selaras dengan penelitian tersebut bahwa kolaborasi pengembangan Newa Fun and Education ini mempunyai tujuan untuk memanfaatkan potensi wisata yang ada di Desa Tambaknegara untuk bisa dijadikan satu objek wisata yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, keuntungan bagi pengembang serta menyediakan wisata edukasi bagi masyarakat terutama edukasi mengenai pelestarian hutan dan edukasi sejarah serta terciptanya pelestarian hutan secara partisipatif oleh masyarakat untuk bersama menjaga fungsi hutan.

Dukungan

Menurut Linden (2002), untuk menghindari konflik yang ditimbulkan oleh kepentingan kelompok yang berseberangan, kerjasama membutuhkan dukungan yang kuat. Dukungan juga dapat diartikan sebagai strategi atau cara politik untuk mendorong pemangku kepentingan untuk terus berpartisipasi dan terlibat dalam proses kolaboratif. Dukungan terhadap proses kerjasama dapat dilihat dari apakah dalam pelaksanaan kolaborasi terdapat sistem reward and punishment dan apakah suatu program melibatkan pemangku kepentingan atau masyarakat pada tahapan kolaborasi yang meliputi fase perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Hasil penelitian menunjukkan pada tahap pelaksanaan, kolaborasi mendapat dukungan dari pihak keamanan seperti Polisi Hutan, dan dari pihak Kepolisian yang terus aktif melakukan patroli mengenai pembangunan Newa, selain itu juga dukungan masyarakat yaitu ikut meramaikan wisata dengan melakukan kegiatan di lokasi wisata. Sedangkan pada proses evaluasi dilaksanakan oleh tim asesor dari Perhutani yang melakukan penilaian pembangunan dan pengembangan Newa Fun and Education secara berkala.

Melibatkan aktor diluar kolaborasi dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam konteks kolaborasi. Jika keterlibatan ini direncanakan dengan baik maka akan tercipta dukungan yang kuat untuk memperlancar tercapainya tujuan kolaborasi. Pelibatan aktor diluar kolaborasi dalam pengembangan Newa Fun and Education sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juang Abdi (2021), juga menunjukkan hal serupa yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses collaborative governance menjadi bagian penting dalam menunjang keberhasilannya, hal ini ditandai dengan meningkatkan kunjungan wisata ke desa wisata Sanankerto dan perekonomian lokal menjadi meningkat.

Dukungan dalam kolaborasi pengembangan Newa Fun and Education juga mencakup penerapan reward and punishment yang terfokus pada kepatuhan hukum dan progres kinerja, sistem reward and punishment yang digunakan dalam kolaborasi ini dari Perhutani adalah terkait perkembangan pembangunan Newa yang harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang sudah mengatur mengenai pengembangan wisata alam terutama mengenai terjaganya fungsi hutan, selain itu reward and punishment juga diberlakukan terhadap pekerja fisik pembangunan Newa yaitu mengenai progress kinerja yang harus disesuaikan dengan spesialisasi dan perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan konstruksi.

Reward and punishment atau pemberian penghargaan dan hukuman, dapat menjadi instrumen yang penting dalam mengelola kolaborasi tergantung pada konteks dan dinamika kelompok. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan reward and punishment harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan situasi. penggunaan reward and punishment harus disesuaikan dengan nilai-nilai

dan tujuan kolaborasi serta mempertimbangkan keberagaman preferensi individu dalam kolaborasi. Pemberlakuan sistem reward dan punishment dalam pembangunan Nawa sudah dilaksanakan secara proporsional, hal ini berkaitan dengan proses saat ini yang baru pada tahap pengembangan wisata baru. Sejalan dengan perkembangan maka kriteria yang digunakan untuk menentukan perolehan reward maupun punishment akan berubah mengikuti proses perkembangan dan keberhasilan kolaborasi.

Kepemimpinan Kolaboratif

Menurut Linden (2002), pemimpin dalam bekerjasama harus tegas dan mampu mendorong bawahannya untuk bekerjasama. Pemimpin juga harus bisa mengendalikan ego mereka, dia harus mengizinkan anggota untuk memilih berkolaborasi atas dasar kesadarannya sendiri dengan tanpa ada paksaan dan dia harus bisa melihat kemungkinan menghubungkan pekerjaan dengan sesuatu yang lebih besar di masa depan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada proses kolaborasi pengembangan Nawa Fun and Education untuk mendorong stakeholder bekerja secara kolektif adalah dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dan pertemuan untuk diskusi dan saling bertukar pikiran baik secara daring melalui whatsapp group maupun melalui pertemuan langsung. Pemimpin tegas dalam konteks kolaboratif adalah figur yang memiliki keberanian dan kejelasan dalam membimbing dan mendorong para stakeholder untuk bekerja secara kolektif. Pemimpin ini menonjol dengan sifat-sifat kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk memotivasi serta mengarahkan upaya bersama. Dalam konteks pembangunan Nawa Fun and Education setiap pimpinan stakeholder melakukan upaya-upaya untuk mendorong anggotanya untuk melakukan kerja-kerja kolektif sesuai dengan standar kinerja dan prioritas kinerja yang sudah ditentukan.

Pada proses kolaborasi pengembangan Nawa Fun and Education tidak terdapat ego sektoral, semua stakeholder saling berusaha untuk memerankan peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yaitu mengembangkan Nawa Fun and Education. Para stakeholder untuk dapat mengendalikan ego masing-masing. Mereka merasa puas saat dapat berbagi penghargaan dengan banyak orang. Ambisinya lebih terfokus pada kesuksesan kolaborasi daripada pencapaian pribadi.

Terdapat sistem push and pull terhadap pekerjaan dalam kolaborasi pengembangan Nawa yang diterapkan yaitu terkait kesepakatan yang sementara hanya diikat melalui MoU belum menggunakan PKS karena pengembangan Nawa masih tahap pembangunan fisik untuk mempersiapkan kesiapan sarana dan prasarana untuk wisata agar dapat memberikan layanan pariwisata yang memadai, sehingga hal tersebut membuat belum bisanya untuk melakukan musyawarah bagi hasil keuntungan dari pengembangan Nawa.

Push and Pull terhadap pekerjaan dalam konteks kolaborasi berarti menciptakan keseimbangan yang tidak terlalu memberikan tekanan berlebihan atau membebani, namun tetap memberikan motivasi yang cukup. Pendekatan "push" melibatkan penggunaan insentif atau dorongan eksternal dengan tetap memperhatikan batas-batas kesehatan dan keseimbangan kerja. Di sisi lain, pendekatan "pull" berfokus pada penciptaan motivasi internal dan pengalaman yang memikat tanpa memberikan tekanan yang terlalu berat. Gabungan kedua pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja kolaboratif yang mendukung kinerja optimal tanpa membebani atau memaksa secara berlebihan.

Dalam pengembangan Nawa Fun and Education push and pull dilakukan pada tidak adanya pemaksaan untuk segera melakukan perjanjian kerja sama, hal ini karena perjanjian kerjasama yang tidak disusun dengan matang akan membawa konsekuensi buruk pada setiap stakeholder yaitu kerugian bagi pihak-pihak yang berkolaborasi, maka dari itu sejalan dengan proses pembangunan fisik wisata yang sedang berjalan bisa digunakan untuk merumuskan butir-butir pada perjanjian kerja sama yang akan disepakati oleh para stakeholder .

Newa mempunyai prospek yang baik untuk dijadikan sebagai salah satu objek wisata alam alternatif unggulan di wilayah Banyumas Selatan selain Curug Song karena mempunyai berbagai macam keunggulan atau perangkat wisata yang dapat menunjang kunjungan wisata dan daya tarik wisata seperti kemudahan akses karena berada didekat akses jalan nasional, wahana edukatif mengenai hutan dan sejarah serta mempunyai keunggulan view yang indah yaitu gugusan pengunungan serayu, sungai dan bendungan, dengan catatan asalkan Newa bisa dikelola dan dimanajemen dengan baik. upaya yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan besar tersebut adalah dengan melakukan penambahan fasilitas fisik seperti jalan, tempat parkir, penerangan, cafe, homestay dan wahana lainnya.

Seperti kebanyakan manusia, pemimpin kolaboratif sangat mendambakan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Yang membedakan mereka adalah, tidak seperti kebanyakan orang lain, para pemimpin ini melihat potensi hubungan dengan tujuan yang lebih besar yang ada dalam diri mereka. Pada pengembangan Newa Fun and Education visi yang muncul didasarkan pada faktor-faktor keunggulan yang dimiliki oleh wisata Newa, selain itu juga terdapat kekosongan ikon wisata di Banyumas Selatan yang hanya identik dengan adanya wisata Curug Song sehingga bisa dijadikan wisata alam alternatif bagi para wisatawan tertuma bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Banyumas Selatan.

KESIMPULAN

Collaborative governance dalam pengembangan Newa Fun and Education di Desa Tambaknegara, Banyumas melibatkan sinergi antar-stakeholder dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yaitu Perhutani sebagai pemilik lahan, LMDH Tanjung Wanakarya sebagai penghubung masyarakat, KMPS Margo Mulyo sebagai wadah berbadan hukum masyarakat, CV. Ardelia Jaya sebagai investor dan pengembang, serta pemerintah desa sebagai pendukung moral. Proses kolaborasi ini telah menunjukkan kohesi yang baik dalam aspek dasar kolaborasi, komitmen, dukungan, dan kepemimpinan, namun masih terkendala masalah kepercayaan akibat persoalan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola manajemen dan akuntabilitas keuangan, perluasan kolaborasi untuk menambah sumber pembiayaan dan investor, pelibatan konsultan pariwisata maupun teknik untuk menjaga kualitas pembangunan, serta sinergi dengan rencana pengembangan desa wisata dan kebijakan pariwisata daerah guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan Newa Fun and Education.

REFERENCES

- Charalabidis, Yannis & Koussouris, S. (2012). *Empowering Open and Collaborative Governance*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-27219-6>
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. California: SAGE Publications, Inc.
- Linden, R. M. (2002). *Working Across Boundaries: Making Collaboration Work in Government and Nonprofit Organizations*. San Fransisco: Jossey-Bass. <https://doi.org/10.1177/0899764004269429>
- Maddatuang, B., Sabara, Z., Wekke, I. S., & Karim, A. (2020). *Langkah Mewujudkan Insan Cita Pandangan Lintas Disiplin*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Akbar, M. T., & Sihalohe, E. D. (2019). *The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value across Provinces in Indonesia*. 14(2), 194–200.
- Alfada, A. (2019). The Destructive Effect Of Corruption On Economic Growth In Indonesia : A Threshold Model Heliyon The Destructive Effect Of Corruption On Economic Growth In

- Indonesia : A Threshold Model. *Heliyon*, October, e02649.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Atmoko, T. P. H. (2014). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Media Wisata*, 12(2). <https://doi.org/10.36276/mws.v12i2.209>
- Ekowati, S. (2020). *Strengthening Village Apparatus Capacity In Village Development In Air Periukan Village , Seluma District , Bengkulu Province , Indonesia Titi Darmi*. 5, 68–74.
<https://doi.org/10.14254/jems.2020.5-1.6>
- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). *The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds*. 22(March), 89–95. <https://doi.org/10.21512/tw.v22i1.7013>
- Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 68–84.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119>
- Muhammad, J. A. (2021). Collaborative Governance Pengembangan Desa Wisata Sanankerto dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal. *Jiap*, 7(2), 142–148.
- Paramitha, O. D., Kagungan, D., & Mulyanan, N. (2020). Strategi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Tanggamus. *Administrativa*, 2(1).
- Pilving, T., Kull, T., Suškevics, M., & Viira, A. H. (2019). The tourism partnership life cycle in Estonia: Striving towards sustainable multisectoral rural tourism collaboration. *Tourism Management Perspectives*, 31(February), 219–230. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.05.001>
- Sari, B. S. N. (2014). *Collaborative Governance di DKI Jakarta: Partisipasi Masyarakat dalam Membuat Kebijakan Pajak*.
- Sastrayuda, G. S. (2017). *Konsep Pengembangan Desa Wisata Hand Out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Setiawan, A., & Sutikno, C. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Waduk Penjalin Di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.56681/da.v19i1.47>
- Silvia, C. (2011). Collaborative Governance Concepts for Successful Network Leadership. *State & Local Government Review*, 43, 66–71. <https://doi.org/10.2307/41303176>
- Kemenparekraf. “Jaringan Desa Wisata.” Kemenparekraf. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/home> (diakses 28 September 2023).
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 Undang – undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.